



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2010

Kementerian Keuangan. Dana Bagi Hasil. SDA.
Hutan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 20/PMK.07/2010
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.808/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perkiraan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan lebih kecil dari pagu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.808/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2010.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp1.039.228.977.759,00 (satu triliun tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah sebesar Rp15.792.800.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan adalah sebesar Rp477.714.791.239,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan;
 - c. Dana Reboisasi adalah sebesar Rp545.721.386.520,00 (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (3) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atas perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai realisasi penerimaan setelah dilakukan revisi.
- (2) Dalam hal perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 melebihi pagu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, maka dapat dilakukan penyaluran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**PEKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH				
		IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	172,406,383	38,976,000	211,382,383
1	Kab. Aceh Barat	-	3,134,661	-	3,134,661
2	Kab. Aceh Besar	-	45,898,298	-	45,898,298
3	Kab. Aceh Selatan	-	3,134,661	-	3,134,661
4	Kab. Aceh Singkil	-	3,134,661	-	3,134,661
5	Kab. Aceh Tengah	-	3,134,661	-	3,134,661
6	Kab. Aceh Tenggara	-	3,134,661	-	3,134,661
7	Kab. Aceh Timur	-	3,134,661	-	3,134,661
8	Kab. Aceh Utara	-	3,134,661	-	3,134,661
9	Kab. Bireun	-	3,134,661	-	3,134,661
10	Kab. Pidie	-	7,093,352	1,440,000	8,533,352
11	Kab. Simeulue	-	3,134,661	-	3,134,661
12	Kota Banda Aceh	-	3,134,661	-	3,134,661
13	Kota Sabang	-	3,134,661	-	3,134,661
14	Kota Langsa	-	3,134,661	-	3,134,661
15	Kota Lhokseumawe	-	3,134,661	-	3,134,661
16	Kab. Nagan Raya	-	3,134,661	-	3,134,661
17	Kab. Aceh Jaya	-	4,234,298	-	4,234,298
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	3,134,661	-	3,134,661
19	Kab. Gayo Lues	-	3,134,661	-	3,134,661
20	Kab. Aceh Tamiang	-	3,134,661	-	3,134,661
21	Kab. Bener Meriah	-	21,140,596	37,536,000	58,676,596
22	Kab. Pidie Jaya	-	3,134,661	-	3,134,661
23	Kota Subulussalam	-	3,134,661	-	3,134,661
24	Bagian Provinsi	-	34,481,280	-	34,481,280
II	Provinsi Sumatera Utara	-	2,121,213,310	-	2,121,213,310
1	Kab. Asahan	-	26,515,166	-	26,515,166
2	Kab. Dairi	-	26,515,166	-	26,515,166
3	Kab. Deli Serdang	-	26,515,166	-	26,515,166
4	Kab. Karo	-	34,443,410	-	34,443,410
5	Kab. Labuhan Batu	-	443,110,754	-	443,110,754

6	Kab. Langkat	-	26,515,166	-	26,515,166
7	Kab. Mandailing Natal	-	26,515,166	-	26,515,166
8	Kab. Nias	-	26,515,166	-	26,515,166
9	Kab. Simalungun	-	26,515,166	-	26,515,166
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	26,515,166	-	26,515,166
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	26,515,166	-	26,515,166
12	Kab. Tapanuli Utara	-	58,623,416	-	58,623,416
13	Kab. Toba Samosir	-	91,344,065	-	91,344,065
14	Kota Binjai	-	26,515,166	-	26,515,166
15	Kota Medan	-	26,515,166	-	26,515,166
16	Kota Pematang Siantar	-	26,515,166	-	26,515,166
17	Kota Sibolga	-	26,515,166	-	26,515,166
18	Kota Tanjung Balai	-	26,515,166	-	26,515,166
19	Kota Tebing Tinggi	-	26,515,166	-	26,515,166
20	Kota Padang Sidempuan	-	26,515,166	-	26,515,166
21	Kab. Pakpak Bharat	-	26,515,166	-	26,515,166
22	Kab. Nias Selatan	-	26,710,776	-	26,710,776
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	90,059,272	-	90,059,272
24	Kab. Serdang Bedagai	-	26,515,166	-	26,515,166
25	Kab. Samosir	-	26,515,166	-	26,515,166
26	Kab. Batu Bara	-	26,515,166	-	26,515,166
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	26,515,166	-	26,515,166
28	Kab. Padang Lawas	-	263,284,635	-	263,284,635
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	26,515,166	-	26,515,166
30	Kab. Labuhan Batu Utara	-	26,515,166	-	26,515,166
31	Kab. Nias Utara	-	26,515,166	-	26,515,166
32	Kab. Nias Barat	-	26,515,166	-	26,515,166
33	Kab. Gunung Sitoli	-	26,515,166	-	26,515,166
34	Bagian Provinsi	-	424,242,666	-	424,242,666
III	Provinsi Sumatera Barat	-	11,223,724,234	12,896,040,000	24,119,764,234
1	Kab. Limapuluh Kota	-	249,416,094	-	249,416,094
2	Kab. Agam	-	249,847,667	-	249,847,667
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	2,059,391,134	5,821,296,000	7,880,687,134
4	Kab. Padang Pariaman	-	249,416,094	-	249,416,094
5	Kab. Pasaman	-	249,847,667	-	249,847,667
6	Kab. Pesisir Selatan	-	249,416,094	-	249,416,094
7	Kab. Sijunjung	-	249,416,094	-	249,416,094
8	Kab. Solok	-	288,689,267	-	288,689,267
9	Kab. Tanah Datar	-	252,652,894	-	252,652,894

10	Kota Bukit Tinggi	-	249,416,094	-	249,416,094
11	Kota Padang Panjang	-	249,416,094	-	249,416,094
12	Kota Padang	-	249,416,094	-	249,416,094
13	Kota Payakumbuh	-	249,416,094	-	249,416,094
14	Kota Sawahlunto	-	250,969,758	-	250,969,758
15	Kota Solok	-	249,416,094	-	249,416,094
16	Kota Pariaman	-	249,416,094	-	249,416,094
17	Kab. Pasaman Barat	-	351,676,156	336,472,000	688,148,156
18	Kab. Dharmasraya	-	2,330,326,103	6,074,656,000	8,404,982,103
19	Kab. Solok Selatan	-	451,417,800	663,616,000	1,115,033,800
20	Bagian Provinsi	-	2,244,744,848	-	2,244,744,848
IV	Provinsi Riau	-	41,950,381,716	54,385,824,760	96,336,206,476
1	Kab. Bengkalis	-	2,937,680,199	3,785,419,040	6,723,099,239
2	Kab. Indragiri Hilir	-	3,456,476,624	10,995,323,200	14,451,799,824
3	Kab. Indragiri Hulu	-	1,881,177,552	11,028,800	1,892,206,352
4	Kab. Kampar	-	2,805,157,579	833,613,800	3,638,771,379
5	Kab. Kuantan Singingi	-	1,965,359,044	-	1,965,359,044
6	Kab. Pelalawan	-	5,567,774,702	16,025,405,800	21,593,180,502
7	Kab. Rokan Hilir	-	2,592,189,316	5,119,754,400	7,711,943,716
8	Kab. Rokan Hulu	-	1,609,798,317	-	1,609,798,317
9	Kab. Siak	-	3,796,855,173	8,588,561,800	12,385,416,973
10	Kota Dumai	-	3,426,162,756	7,764,911,560	11,191,074,316
11	Kota Pekanbaru	-	1,525,468,426	-	1,525,468,426
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	1,996,205,684	1,261,806,360	3,258,012,044
13	Bagian Provinsi	-	8,390,076,344	-	8,390,076,344
V	Provinsi Jambi	-	7,509,271,029	5,182,898,720	12,692,169,749
1	Kab. Batanghari	-	831,598,107	232,000,000	1,063,598,107
2	Kab. Bungo	-	300,370,841	-	300,370,841
3	Kab. Kerinci	-	300,370,841	-	300,370,841
4	Kab. Merangin	-	300,370,841	-	300,370,841
5	Kab. Muaro Jambi	-	530,770,841	-	530,770,841
6	Kab. Sarolangun	-	446,602,841	600,000,000	1,046,602,841
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	877,954,841	392,000,000	1,269,954,841
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	570,745,147	278,898,720	849,643,867
9	Kab. Tebo	-	1,247,890,841	3,680,000,000	4,927,890,841
10	Kota Jambi	-	300,370,841	-	300,370,841
11	Kab. Sungai Penuh	-	300,370,841	-	300,370,841
12	Bagian Provinsi	-	1,501,854,206	-	1,501,854,206

VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	15,670,653,501	15,717,196,000	31,387,849,501
1	Kab. Lahat	-	533,072,385	-	533,072,385
2	Kab. Musi Banyuasin	-	3,470,001,746	15,717,196,000	19,187,197,746
3	Kab. Musi Rawas	-	1,072,921,528	-	1,072,921,528
4	Kab. Muara Enim	-	869,319,243	-	869,319,243
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	1,867,012,043	-	1,867,012,043
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	476,377,528	-	476,377,528
7	Kota Palembang	-	447,732,957	-	447,732,957
8	Kota Pagar Alam	-	447,732,957	-	447,732,957
9	Kota Lubuk Linggau	-	447,732,957	-	447,732,957
10	Kota Prabumulih	-	447,732,957	-	447,732,957
11	Kab. Banyuasin	-	638,142,100	-	638,142,100
12	Kab. Ogan Ilir	-	447,732,957	-	447,732,957
13	Kab. OKU Timur	-	475,545,528	-	475,545,528
14	Kab. OKU Selatan	-	447,732,957	-	447,732,957
15	Kab. Empat Lawang	-	447,732,957	-	447,732,957
16	Bagian Provinsi	-	3,134,130,701	-	3,134,130,701
VII	Provinsi Bengkulu	-	236,639,997	332,800,000	569,439,997
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	23,317,333	51,200,000	74,517,333
2	Kab. Bengkulu Utara	-	29,973,333	76,800,000	106,773,333
3	Kab. Rejang Lebong	-	10,517,333	-	10,517,333
4	Kota Bengkulu	-	10,517,333	-	10,517,333
5	Kab. Kaur	-	29,973,333	76,800,000	106,773,333
6	Kab. Seluma	-	23,488,000	51,200,000	74,688,000
7	Kab. Mukomuko	-	29,973,333	76,800,000	106,773,333
8	Kab. Lebong	-	10,517,333	-	10,517,333
9	Kab. Kepahiang	-	10,517,333	-	10,517,333
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	10,517,333	-	10,517,333
11	Bagian Provinsi	-	47,328,000	-	47,328,000
VIII	Provinsi Lampung	-	610,116,000	-	610,116,000
1	Kab. Lampung Barat	-	18,772,800	-	18,772,800
2	Kab. Lampung Selatan	-	18,772,800	-	18,772,800
3	Kab. Lampung Tengah	-	18,772,800	-	18,772,800
4	Kab. Lampung Utara	-	18,772,800	-	18,772,800
5	Kab. Lampung Timur	-	18,772,800	-	18,772,800
6	Kab. Tanggamus	-	18,772,800	-	18,772,800
7	Kab. Tulang Bawang	-	197,908,800	-	197,908,800
8	Kab. Way Kanan	-	64,910,400	-	64,910,400

9	Kota Bandar Lampung	-	18,772,800	-	18,772,800
10	Kota Metro	-	18,772,800	-	18,772,800
11	Kab. Pesawaran	-	18,772,800	-	18,772,800
12	Kab. Pringsewu	-	18,772,800	-	18,772,800
13	Kab. Mesuji	-	18,772,800	-	18,772,800
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	18,772,800	-	18,772,800
15	Bagian Provinsi	-	122,023,200	-	122,023,200
IX	Provinsi Jawa Barat	-	11,875,468,223	-	11,875,468,223
1	Kab. Bandung	-	228,999,439	-	228,999,439
2	Kab. Bekasi	-	190,007,491	-	190,007,491
3	Kab. Bogor	-	230,019,200	-	230,019,200
4	Kab. Ciamis	-	2,064,669,679	-	2,064,669,679
5	Kab. Cianjur	-	1,608,700,877	-	1,608,700,877
6	Kab. Cirebon	-	190,007,491	-	190,007,491
7	Kab. Garut	-	195,376,704	-	195,376,704
8	Kab. Indramayu	-	561,289,039	-	561,289,039
9	Kab. Karawang	-	190,007,491	-	190,007,491
10	Kab. Kuningan	-	288,584,286	-	288,584,286
11	Kab. Majalengka	-	206,190,215	-	206,190,215
12	Kab. Purwakarta	-	359,639,151	-	359,639,151
13	Kab. Subang	-	190,007,491	-	190,007,491
14	Kab. Sukabumi	-	533,805,043	-	533,805,043
15	Kab. Sumedang	-	294,435,994	-	294,435,994
16	Kab. Tasikmalaya	-	268,560,074	-	268,560,074
17	Kota Bandung	-	190,007,491	-	190,007,491
18	Kota Bekasi	-	190,007,491	-	190,007,491
19	Kota Bogor	-	190,007,491	-	190,007,491
20	Kota Cirebon	-	190,007,491	-	190,007,491
21	Kota Depok	-	190,007,491	-	190,007,491
22	Kota Sukabumi	-	190,007,491	-	190,007,491
23	Kota Cimahi	-	190,007,491	-	190,007,491
24	Kota Tasikmalaya	-	190,007,491	-	190,007,491
25	Kota Banjar	-	190,007,491	-	190,007,491
26	Kab. Bandung Barat	-	190,007,491	-	190,007,491
27	Bagian Provinsi	-	2,375,093,648	-	2,375,093,648
X	Provinsi Banten	-	1,617,479,484	-	1,617,479,484
1	Kab. Lebak	-	147,883,838	-	147,883,838
2	Kab. Pandeglang	-	591,535,355	-	591,535,355

3	Kab. Serang	-	92,427,399	-	92,427,399
4	Kab. Tangerang	-	92,427,399	-	92,427,399
5	Kota Cilegon	-	92,427,399	-	92,427,399
6	Kota Tangerang	-	92,427,399	-	92,427,399
7	Kota Serang	-	92,427,399	-	92,427,399
8	Kota Tangerang Selatan	-	92,427,399	-	92,427,399
9	Bagian Provinsi	-	323,495,897	-	323,495,897
XI	Provinsi Jawa Tengah	-	21,753,206,073	-	21,753,206,073
1	Kab. Banjarnegara	-	255,920,071	-	255,920,071
2	Kab. Banyumas	-	255,920,071	-	255,920,071
3	Kab. Batang	-	255,920,071	-	255,920,071
4	Kab. Blora	-	5,171,154,222	-	5,171,154,222
5	Kab. Boyolali	-	255,920,071	-	255,920,071
6	Kab. Brebes	-	255,920,071	-	255,920,071
7	Kab. Cilacap	-	744,756,454	-	744,756,454
8	Kab. Demak	-	255,920,071	-	255,920,071
9	Kab. Grobogan	-	255,920,071	-	255,920,071
10	Kab. Jepara	-	255,920,071	-	255,920,071
11	Kab. Karanganyar	-	255,920,071	-	255,920,071
12	Kab. Kebumen	-	281,802,010	-	281,802,010
13	Kab. Kendal	-	870,647,488	-	870,647,488
14	Kab. Klaten	-	255,920,071	-	255,920,071
15	Kab. Kudus	-	257,170,499	-	257,170,499
16	Kab. Magelang	-	255,920,071	-	255,920,071
17	Kab. Pati	-	324,371,855	-	324,371,855
18	Kab. Pekalongan	-	255,920,071	-	255,920,071
19	Kab. Pemalang	-	1,293,099,381	-	1,293,099,381
20	Kab. Purbalingga	-	255,920,071	-	255,920,071
21	Kab. Purworejo	-	267,225,291	-	267,225,291
22	Kab. Rembang	-	1,061,940,645	-	1,061,940,645
23	Kab. Semarang	-	260,275,308	-	260,275,308
24	Kab. Sragen	-	255,920,071	-	255,920,071
25	Kab. Sukoharjo	-	255,920,071	-	255,920,071
26	Kab. Tegal	-	698,378,120	-	698,378,120
27	Kab. Temanggung	-	255,920,071	-	255,920,071
28	Kab. Wonogiri	-	285,581,948	-	285,581,948
29	Kab. Wonosobo	-	255,920,071	-	255,920,071
30	Kota Magelang	-	255,920,071	-	255,920,071
31	Kota Pekalongan	-	255,920,071	-	255,920,071

32	Kota Salatiga	-	255,920,071	-	255,920,071
33	Kota Semarang	-	255,920,071	-	255,920,071
34	Kota Surakarta	-	255,920,071	-	255,920,071
35	Kota Tegal	-	255,920,071	-	255,920,071
36	Bagian Provinsi	-	4,350,641,219	-	4,350,641,219
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	11,352,000	-	11,352,000
1	Kab. Bantul	-	1,360,920	-	1,360,920
2	Kab. Gunung Kidul	-	4,283,400	-	4,283,400
3	Kab. Kulon Progo	-	1,166,880	-	1,166,880
4	Kab. Sleman	-	1,135,200	-	1,135,200
5	Kota Yogyakarta	-	1,135,200	-	1,135,200
6	Bagian Provinsi	-	2,270,400	-	2,270,400
		-			
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	9,105,993,067	-	9,105,993,067
1	Kab. Bangkalan	-	98,443,168	-	98,443,168
2	Kab. Banyuwangi	-	98,443,168	-	98,443,168
3	Kab. Blitar	-	269,060,673	-	269,060,673
4	Kab. Bojonegoro	-	98,443,168	-	98,443,168
5	Kab. Bondowoso	-	225,765,874	-	225,765,874
6	Kab. Gresik	-	98,443,168	-	98,443,168
7	Kab. Jember	-	642,390,792	-	642,390,792
8	Kab. Jombang	-	187,065,654	-	187,065,654
9	Kab. Kediri	-	98,443,168	-	98,443,168
10	Kab. Lamongan	-	98,443,168	-	98,443,168
11	Kab. Lumajang	-	453,426,986	-	453,426,986
12	Kab. Madiun	-	98,443,168	-	98,443,168
13	Kab. Magetan	-	100,706,525	-	100,706,525
14	Kab. Malang	-	98,443,168	-	98,443,168
15	Kab. Mojokerto	-	98,443,168	-	98,443,168
16	Kab. Nganjuk	-	98,443,168	-	98,443,168
17	Kab. Ngawi	-	98,443,168	-	98,443,168
18	Kab. Pacitan	-	98,443,168	-	98,443,168
19	Kab. Pamekasan	-	98,443,168	-	98,443,168
20	Kab. Pasuruan	-	181,842,983	-	181,842,983
21	Kab. Ponorogo	-	98,443,168	-	98,443,168
22	Kab. Probolinggo	-	230,088,746	-	230,088,746
23	Kab. Sampang	-	98,443,168	-	98,443,168
24	Kab. Sidoarjo	-	98,443,168	-	98,443,168
25	Kab. Situbondo	-	356,733,123	-	356,733,123

26	Kab. Sumenep	-	281,681,222	-	281,681,222
27	Kab. Trenggalek	-	127,120,364	-	127,120,364
28	Kab. Tuban	-	1,669,389,140	-	1,669,389,140
29	Kab. Tulungagung	-	98,443,168	-	98,443,168
30	Kota Blitar	-	98,443,168	-	98,443,168
31	Kota Kediri	-	98,443,168	-	98,443,168
32	Kota Madiun	-	98,443,168	-	98,443,168
33	Kota Malang	-	98,443,168	-	98,443,168
34	Kota Mojokerto	-	98,443,168	-	98,443,168
35	Kota Pasuruan	-	98,443,168	-	98,443,168
36	Kota Probolinggo	-	98,443,168	-	98,443,168
37	Kota Surabaya	-	98,443,168	-	98,443,168
38	Kota Batu	-	98,443,168	-	98,443,168
39	Bagian Provinsi	-	1,821,198,617	-	1,821,198,617
		-			
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	23,239,051,239	30,406,804,000	53,645,855,239
1	Kab. Bengkayang	-	715,047,730	-	715,047,730
2	Kab. Landak	-	715,047,730	-	715,047,730
3	Kab. Kapuas Hulu	-	2,463,923,707	6,422,496,000	8,886,419,707
4	Kab. Ketapang	-	4,047,054,421	12,415,492,000	16,462,546,421
5	Kab. Pontianak	-	715,047,730	-	715,047,730
6	Kab. Sambas	-	715,047,730	-	715,047,730
7	Kab. Sanggau	-	715,047,730	-	715,047,730
8	Kab. Sintang	-	2,550,081,415	6,556,652,000	9,106,733,415
9	Kota Pontianak	-	1,134,380,693	512,960,000	1,647,340,693
10	Kota Singkawang	-	715,047,730	-	715,047,730
11	Kab. Sekadau	-	715,047,730	-	715,047,730
12	Kab. Melawi	-	1,960,371,184	4,499,204,000	6,459,575,184
13	Kab. Kayong Utara	-	715,047,730	-	715,047,730
14	Kab. Kubu Raya	-	715,047,730	-	715,047,730
15	Bagian Provinsi	-	4,647,810,249	-	4,647,810,249
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	123,609,505,756	167,333,428,000	290,942,933,756
1	Kab. Barito Selatan	-	4,419,827,648	2,527,448,000	6,947,275,648
2	Kab. Barito Utara	-	8,131,930,835	15,593,948,000	23,725,878,835
3	Kab. Kapuas	-	7,177,047,842	12,333,420,000	19,510,467,842
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	6,057,916,352	8,190,716,000	14,248,632,352
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	7,423,905,092	13,343,788,000	20,767,693,092
6	Kota Palangkaraya	-	3,803,369,408	-	3,803,369,408
7	Kab. Barito Timur	-	3,803,369,408	-	3,803,369,408

8	Kab. Murung Raya	-	9,562,028,834	20,960,228,000	30,522,256,834
9	Kab. Pulang Pisau	-	3,803,369,408	-	3,803,369,408
10	Kab. Gunung Mas	-	5,736,066,102	7,107,656,000	12,843,722,102
11	Kab. Lamandau	-	6,044,369,363	8,250,908,000	14,295,277,363
12	Kab. Sukamara	-	3,803,369,408	-	3,803,369,408
13	Kab. Katingan	-	12,898,872,866	33,062,424,000	45,961,296,866
14	Kab. Seruyan	-	16,222,162,038	45,962,892,000	62,185,054,038
15	Bagian Provinsi	-	24,721,901,152	-	24,721,901,152
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	2,613,152,563	1,618,904,920	4,232,057,483
1	Kab. Banjar	-	87,105,085	-	87,105,085
2	Kab. Barito Kuala	-	355,986,713	656,031,760	1,012,018,473
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	87,105,085	-	87,105,085
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	87,105,085	-	87,105,085
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	87,105,085	587,990,920	675,096,005
6	Kab. Kota Baru	-	488,621,543	-	488,621,543
7	Kab. Tabalong	-	242,997,014	275,938,120	518,935,134
8	Kab. Tanah Laut	-	183,894,316	11,362,720	195,257,036
9	Kab. Tapin	-	87,105,085	-	87,105,085
10	Kota Banjar Baru	-	87,105,085	-	87,105,085
11	Kota Banjarmasin	-	87,105,085	-	87,105,085
12	Kab. Balangan	-	87,105,085	-	87,105,085
13	Kab. Tanah Bumbu	-	122,181,783	87,581,400	209,763,183
14	Bagian Provinsi	-	522,630,514	-	522,630,514
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	3,150,922,605	78,248,588,910	103,042,788,000	184,442,299,515
1	Kab. Berau	739,416,505	7,299,513,505	17,058,000,000	25,096,930,010
2	Kab. Bulungan	-	13,573,187,351	40,320,000,000	53,893,187,351
3	Kab. Kutai Kartanegara	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
4	Kab. Kutai Barat	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
5	Kab. Kutai Timur	-	12,340,776,569	34,110,656,000	46,451,432,569
6	Kab. Malinau	941,075,551	2,407,648,889	-	3,348,724,440
7	Kab. Nunukan	840,246,028	2,407,648,889	-	3,247,894,917
8	Kab. Paser	-	4,962,876,503	10,636,132,000	15,599,008,503
9	Kota Balikpapan	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
10	Kota Bontang	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
11	Kota Samarinda	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
12	Kota Tarakan	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889
13	Kab. Penajam Paser Utara	-	2,753,677,197	918,000,000	3,671,677,197
14	Kab. Tana Tidung	-	2,407,648,889	-	2,407,648,889

15	Bagian Provinsi	630,184,521	15,649,717,784	-	16,279,902,305
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-	1,997,162,391	4,396,000,000	6,393,162,391
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	60,030,240	-	60,030,240
2	Kab. Minahasa	-	57,061,782	-	57,061,782
3	Kab. Sangihe	-	57,061,782	-	57,061,782
4	Kota Bitung	-	57,061,782	-	57,061,782
5	Kota Manado	-	57,061,782	-	57,061,782
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	57,061,782	-	57,061,782
7	Kab. Minahasa Selatan	-	57,700,045	-	57,700,045
8	Kota Tomohon	-	57,061,782	-	57,061,782
9	Kab. Minahasa Utara	-	57,061,782	-	57,061,782
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	57,061,782	-	57,061,782
11	Kota Kotamubagu	-	57,061,782	-	57,061,782
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	714,619,611	1,884,000,000	2,598,619,611
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	58,626,240	-	58,626,240
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	84,241,440	1,256,000,000	1,340,241,440
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	108,956,297	1,256,000,000	1,364,956,297
16	Bagian Provinsi	-	399,432,480	-	399,432,480
		-			
XIX	Provinsi Gorontalo	-	1,805,040,000	2,408,000,000	4,213,040,000
1	Kab. Boalemo	-	399,635,200	1,152,000,000	1,551,635,200
2	Kab. Gorontalo	-	165,548,800	-	165,548,800
3	Kota Gorontalo	-	144,403,200	-	144,403,200
4	Kab. Pohuwato	-	421,011,200	1,256,000,000	1,677,011,200
5	Kab. Bone Bolango	-	152,646,400	-	152,646,400
6	Kab. Gorontalo Utara	-	160,787,200	-	160,787,200
7	Bagian Provinsi	-	361,008,000	-	361,008,000
		-			
XX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	4,817,869,150	4,706,821,040	9,524,690,190
1	Kab. Banggai	-	192,714,766	-	192,714,766
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	192,714,766	-	192,714,766
3	Kab. Buol	-	893,213,344	2,313,406,480	3,206,619,824
4	Kab. Toli-Toli	-	192,714,766	-	192,714,766
5	Kab. Donggala	-	192,714,766	-	192,714,766
6	Kab. Morowali	-	192,714,766	-	192,714,766
7	Kab. Poso	-	470,053,345	890,894,560	1,360,947,905
8	Kota Palu	-	192,714,766	-	192,714,766
9	Kab. Parigi Moutong	-	573,594,601	382,520,000	956,114,601
10	Kab. Tojo Una Una	-	568,430,668	1,120,000,000	1,688,430,668

11	Kab. Sigi	-	192,714,766	-	192,714,766
12	Bagian Provinsi	-	963,573,830	-	963,573,830
XXII	Provinsi Sulawesi Barat	-	3,128,247,164	4,236,168,000	7,364,415,164
1	Kab. Majene	-	312,824,716	-	312,824,716
2	Kab. Mamuju	-	1,251,298,867	4,236,168,000	5,487,466,867
3	Kab. Polewali Mandar	-	312,824,716	-	312,824,716
4	Kab. Mamasa	-	312,824,716	-	312,824,716
5	Kab. Mamuju Utara	-	312,824,716	-	312,824,716
6	Bagian Provinsi	-	625,649,433	-	625,649,433
XXIII	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2,127,939,550	3,546,565,920	5,674,505,470
1	Kab. Buton	-	77,379,620	-	77,379,620
2	Kab. Konawe	-	77,379,620	-	77,379,620
3	Kab. Kolaka	-	77,379,620	-	77,379,620
4	Kab. Muna	-	77,379,620	-	77,379,620
5	Kota Kendari	-	77,379,620	-	77,379,620
6	Kota Bau-bau	-	77,379,620	-	77,379,620
7	Kab. Konawe Selatan	-	77,379,620	-	77,379,620
8	Kab. Bombana	-	77,379,620	-	77,379,620
9	Kab. Wakatobi	-	77,379,620	-	77,379,620
10	Kab. Kolaka Utara	-	851,175,820	3,546,565,920	4,397,741,740
11	Kab. Konawe Utara	-	77,379,620	-	77,379,620
12	Kab. Buton Utara	-	77,379,620	-	77,379,620
13	Bagian Provinsi	-	425,587,910	-	425,587,910
XXIV	Provinsi Maluku	11,591,569,860	14,686,786,556	21,520,144,480	47,798,500,896
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,397,461,814	587,471,462	-	1,984,933,276
2	Kab. Maluku Tengah	3,432,600,712	587,471,462	-	4,020,072,174
3	Kab. Maluku Tenggara	-	587,471,462	-	587,471,462
4	Kab. Pulau Buru	691,539,073	2,713,400,832	8,403,872,480	11,808,812,385
5	Kota Ambon	-	587,471,462	-	587,471,462
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	587,471,462	-	587,471,462
7	Kab. Seram Bagian Timur	2,781,302,798	2,016,285,542	6,290,600,000	11,088,188,340
8	Kab. Kepulauan Aru	970,351,491	587,471,462	-	1,557,822,953
9	Kota Tual	-	587,471,462	-	587,471,462
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	587,471,462	-	587,471,462
11	Kab. Buru Selatan	-	2,319,971,174	6,825,672,000	9,145,643,174
12	Bagian Provinsi	2,318,313,972	2,937,357,312	-	5,255,671,284

XXV	Provinsi Maluku Utara	-	18,378,517,261	26,442,890,760	44,821,408,021
1	Kab. Halmahera Tengah	-	1,685,317,315	3,159,389,840	4,844,707,155
2	Kab. Halmahera Barat	-	990,184,608	304,813,600	1,294,998,208
3	Kota Ternate	-	918,925,863	-	918,925,863
4	Kab. Halmahera Timur	-	2,282,989,226	5,577,519,520	7,860,508,746
5	Kota Tidore Kepulauan	-	1,197,014,952	1,193,358,160	2,390,373,112
6	Kab. Kepulauan Sula	-	1,447,747,224	2,234,276,720	3,682,023,944
7	Kab. Halmahera Selatan	-	3,301,241,560	9,599,368,880	12,900,610,440
8	Kab. Halmahera Utara	-	1,343,464,820	1,726,767,400	3,070,232,220
9	Kab. Pulau Morotai	-	1,535,928,240	2,647,396,640	4,183,324,880
10	Bagian Provinsi Maluku	-	3,675,703,453	-	3,675,703,453
XXVI	Provinsi Papua	1,050,307,535	33,028,000,742	30,308,403,880	64,386,712,157
1	Kab. Biak Numfor	-	471,828,582	-	471,828,582
2	Kab. Jayapura	-	471,828,582	-	471,828,582
3	Kab. Jayawijaya	-	471,828,582	-	471,828,582
4	Kab. Merauke	840,246,028	1,388,091,371	4,794,564,000	7,022,901,399
5	Kab. Mimika	-	471,828,582	-	471,828,582
6	Kab. Nabire	-	1,865,071,194	2,545,941,280	4,411,012,474
7	Kab. Paniai	-	471,828,582	-	471,828,582
8	Kab. Puncak Jaya	-	471,828,582	-	471,828,582
9	Kab. Yapen Waropen	-	471,828,582	-	471,828,582
10	Kota Jayapura	-	471,828,582	-	471,828,582
11	Kab. Sarmi	-	4,051,317,556	6,567,925,680	10,619,243,236
12	Kab. Keerom	-	2,757,235,339	3,916,844,200	6,674,079,539
13	Kab. Yahukimo	-	471,828,582	-	471,828,582
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	471,828,582	-	471,828,582
15	Kab. Tolikara	-	471,828,582	-	471,828,582
16	Kab. Boven Digoel	-	1,881,227,674	5,402,433,560	7,283,661,234
17	Kab. Mappi	-	471,828,582	-	471,828,582
18	Kab. Asmat	-	471,828,582	-	471,828,582
19	Kab. Waropen	-	942,735,766	1,755,392,120	2,698,127,886
20	Kab. Supiori	-	471,828,582	-	471,828,582
21	Kab. Mamberamo Raya	-	3,156,492,889	5,325,303,040	8,481,795,929
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	471,828,582	-	471,828,582
23	Kab. Yalimo	-	471,828,582	-	471,828,582
24	Kab. Lanny Jaya	-	471,828,582	-	471,828,582
25	Kab. Nduga	-	471,828,582	-	471,828,582
26	Kab. Puncak	-	471,828,582	-	471,828,582
27	Kab. Dogiyai	-	471,828,582	-	471,828,582

28	Kab. Intan Jaya	-	471,828,582	-	471,828,582
29	Kab. Deiyai	-	471,828,582	-	471,828,582
30	Bagian Provinsi	210,061,507	6,605,600,149	-	6,815,661,656
XXVII	Provinsi Papua Barat	-	46,177,024,940	57,200,732,040	103,377,756,980
1	Kab. Sorong	-	6,720,430,744	9,156,578,640	15,877,009,384
2	Kab. Manokwari	-	2,428,958,663	1,598,370,000	4,027,328,663
3	Kab. Fak Fak	-	3,277,820,069	3,547,180,000	6,825,000,069
4	Kota Sorong	-	1,847,080,997	-	1,847,080,997
5	Kab. Sorong Selatan	-	2,615,993,103	2,252,940,000	4,868,933,103
6	Kab. Raja Ampat	-	2,383,298,546	1,329,429,000	3,712,727,546
7	Kab. Teluk Bintuni	-	5,870,225,185	13,263,919,000	19,134,144,185
8	Kab. Teluk Wondama	-	2,549,235,365	1,740,831,000	4,290,066,365
9	Kab. Kaimana	-	5,554,415,285	24,311,484,400	29,865,899,685
10	Kab. Tambrauw	-	1,847,080,997	-	1,847,080,997
11	Kab. Meybrat	-	1,847,080,997	-	1,847,080,997
12	Bagian Provinsi	-	9,235,404,989	-	9,235,404,989
TOTAL NASIONAL		15,792,800,000	477,714,791,239	545,721,386,520	1,039,228,977,759

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI